

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KEGIATAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA TANGERANG

Imron Maulana ¹⁾, S Sunarti ²⁾

- ¹⁾ Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
²⁾ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
¹⁾ Email: imronmaulana@students.undip.ac.id
²⁾ Email: sunarti@pwk.undip.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 29 April 2020

Disetujui : 26 September 2020

Kata Kunci :

Partisipasi Masyarakat,
Keterlibatan Masyarakat, Tingkat
Partisipasi, Rumah Tidak Layak
Huni.

ABSTRAK

Kota Tangerang mencoba mengatasi masalah permukiman melalui program “Tangerang Berbenah” guna mempersiapkan kawasan hunian layak huni dengan lingkungan yang ramah dan sehat. Salah satu kegiatan dari program ini adalah rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, namun permasalahan partisipasi pada setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda beda. Kegiatan rehab RTLH ini dilakukan di beberapa tempat yaitu Kelurahan Kedaung Baru dan Kelurahan Batu Ceper. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan rehab RTLH. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis kuantitatif deskriptif dan tabulasi silang. Terdapat 40 responden yang kesemuanya adalah penerima manfaat bantuan rehab RTLH di Kota Tangerang pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan jika tingkat partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan di Kota Tangerang tergolong tinggi atau rebellious dimana masyarakat mau bekerjasama secara kooperatif dengan stakeholder lainnya serta mereka mampu mengambil keputusan sendiri dalam menentukan kemauannya.

ARTICLE INFO

Article History :

Received : April 29, 2020

Accepted : September 26, 2020

Keywords :

Community Participation, Citizen
Involvement, Ladder of
Participation, Non Eligible House

ABSTRACT

Tangerang is trying to overcome the problem of settlements through the "Tangerang Improving" program in order to prepare a habitable residential area with a friendly and healthy. One of the activities of this program is the rehabilitation of Non Eligible houses (RTLH) using a community participation approach, but the problem of participation in each region has a different tendency. This activity was carried out in several places such as Kedaung Baru and Batu Ceper. The purpose of this study was to analyze the ladder of community participation in RTLH rehab activities. The research method used is a quantitative method with descriptive quantitative analysis techniques and cross tabulation. There were 40 respondents who were all beneficiaries of RTLH rehabilitation assistance in Tangerang City in 2018. The results showed that the ladder of community participation in Tangerang was high or "rebellious" where the community would cooperate with other stakeholders and they were able to make their own decisions in determining their wishes

1. PENDAHULUAN

Konsep partisipasi sekarang ini telah banyak digunakan dalam praktek pembangunan, terutama dalam proses pengembangan masyarakat dimana dia dimulai dari proses pendekatan bottom-up. Pendekatan ini harus diciptakan sebagai partisipasi yang sebenarnya karena fakta bahwa itu melibatkan keputusan berbasis masyarakat dan menyalurkan cara mereka dalam pembangunan. (Flint, 2013) menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam pembangunan sangat bergantung pada pendekatan partisipatif untuk memungkinkan anggota masyarakat terlibat aktif bergerak dalam proses pembangunan keberlanjutan.

Partisipasi sejati harus mempromosikan kesadaran terhadap penerima manfaat proyek dan mitra utama kepada yang dianggap sebagai kelompok terpinggirkan (Melkote and Steeves, 2001). Dengan melakukan itu, orang - orang ini akan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan mereka untuk menanggapi masalah yang ada, dan membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Dengan pendekatan ini, kelompok penerima dapat mengidentifikasi potensi dan kapasitas mereka untuk menemukan bagaimana cara pembangunan terhadap diri mereka sendiri yang mungkin juga membawa dampak saling memiliki di tingkat masyarakat.

Salah satu tantangan kritis untuk menggunakan pendekatan partisipatif, menurut (Burton, 2004) adalah karakter. Dia menjelaskan bahwa para profesional pelaku pembangunan paling sering memandang diri mereka lebih superior daripada peran orang masyarakat lokal, oleh karena itu praktek ini akan menghambat masyarakat lokal untuk mengungkapkan masalah dan kebutuhan mereka. Jelas bahwa proses partisipatif ada di tangan pengguna yang mungkin memanipulasi mereka melalui pengalaman dan sosialisasi mereka sendiri. Hal ini memberikan kita pandangan pribadi bahwa banyak orang yang selama ini berkecimpung atau bekerja di sebuah NGOs tampaknya lebih banyak yang menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan kontribusi masyarakat, daripada melakukan partisipasi secara sukarela.

Perencanaan partisipatif masyarakat sangat penting untuk proses pembangunan berkelanjutan (Roseland and Spiliotopoulou, 2017) karena partisipasi yang paling dasar adalah intervensi untuk melakukan perubahan sosial yang humanis dan berkontribusi sebagai warga negara.

Menurut organisasi Cities Alliance, perbaikan atau peningkatan permukiman kumuh adalah sebuah pendekatan terintegrasi yang menekankan pada perbaikan perumahan, penyediaan air minum, sanitasi dan pengurangan / pencegahan kejahatan, kekerasan dan kemiskinan di daerah kumuh (Alliance, 2014). Telah diketahui bahwa dengan meningkatnya permukiman kumuh sangat signifikan dan berhubungan erat dengan meningkatnya kehidupan perekonomian penduduk termasuk seperti mempromosikan pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan keselamatan dan keamanan, dan memberi kondisi kehidupan yang lebih baik dan menyediakan tempat tinggal bagi orang miskin.

Di negara Uganda Afrika, meskipun pemerintah pusat sudah memiliki kerangka hukum dan kebijakan namun dalam pengelolaan daerah kumuh terhambat oleh belum adanya kerangka hukum dan kebijakan di daerah (Muchadenyika and Waiswa, 2018). Sedangkan menurut (Groenendijk, 2003) keberhasilan sebuah kegiatan sangat tergantung pada keterlibatan stakeholder utama dalam desain dan perencanaan kegiatan. Berkaca dari hal tersebut maka sinkronisasi dan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus juga tersampaikan, harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan turunan kebijakan atas apa yang pemerintah pusat lakukan dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh.

Kondisi rumah mempengaruhi tingkat kepuasan, dan kepuasan sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup (Dittmann and Goebel, 2010). Hal ini berarti seseorang semakin tinggal di tempat yang baik maka kesejahteraannya juga akan semakin baik. Pada tingkat rumah tangga akan mempengaruhi kepribadian, kesehatan, pendapatan, pendidikan dan status pernikahan, sedangkan pada tingkat lingkungan akan menunjukkan pentingnya lingkungan

sebagai sebuah perbandingan sosial dan penentu kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.

UN-Habitat mendefinisikan rumah tidak layak huni sebagai kondisi tempat tinggal tidak permanen, akses air dan sanitasi tidak layak, lingkungan dan kepemilikan tidak terjamin. Sedangkan menurut Permensos No. 20 tahun 2017 menyebutkan bahwa rumah tidak layak huni adalah sebuah tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan secara kesehatan, keamanan dan sosial. Didalamnya juga telah diatur untuk kriteria dan persyaratan agar dapat dilakukan rehab rumah tidak layak huni.

Pemerintah Kota Tangerang sudah berupaya mengatur kebutuhan permukiman yang sehat dan layak huni dengan berbagai macam jenis pendekatan dan kebijakan salah satunya adalah dengan menggunakan program Tangerang Berbenah. Tujuan utamanya adalah untuk percepatan pengentasan kawasan kumuh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat karena untuk mencapai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, diperlukan peran masyarakat dan pemerintah untuk saling memperkuat.

Tangga partisipasi telah berkembang setiap dekadanya dimulai dari tangga partisipasi Arnstein di tahun 1969 dari tingkat Non-participation, Tokenisme dan Citizen Control. Namun pada akhir dekade ini (Kotus and Sowada, 2017) mengungkapkan bahwa keberadaan mitra utama dalam tangga partisipasi adalah pemerintah, masyarakat lokal dan masyarakat kota, mereka harus bekerja bersama membentuk 'Participatory Urban Triad'. Kemudian dia membagi tiga tipe perilaku dasar pada setiap aktor dalam berpartisipasi berdasarkan tingkat aktivitasnya yaitu :

- Pemerintah : Directive – Deliberative-Directive – Deliberative.
- Masyarakat lokal : Withdrawn – Collaborating – Rebellious.
- Masyarakat kota : Feigned – Collaborative – Radical

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana partisipasi masyarakat pada kegiatan rehab rumah tidak layak huni dalam pengentasan kawasan kumuh di Kota Tangerang" dengan

mengambil sampel 2 lokasi yaitu Kelurahan Kedaung Baru dan Kelurahan Batu Ceper.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan rehab rumah tidak layak huni dalam program Pengembangan Perumahan di Kelurahan Kedaung Baru dan Kelurahan Batu Ceper Kota Tangerang.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Creswell, 2009) terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif cenderung tidak subyektif karena memanfaatkan teori yang sebelumnya sudah ada dan lebih dibatasi oleh data serta peluang untuk menggali lebih dalam pada respondennya. Namun penelitian kuantitatif dapat merumuskan konsep teori secara tepat serta dapat menjelaskan fenomena sosial dalam narasi yang lebih rinci dan bermanfaat tentang sebuah proses kegiatan tertentu dari sebuah pengalaman manusia sebagai masyarakat yang menjadi pelakunya

Responden pada penelitian ini adalah semua keluarga penerima manfaat kegiatan bantuan rehab rumah tidak layak huni di Kelurahan Kedaung Baru dan Kelurahan Batu Ceper pada tahun 2018. Pada wilayah penelitian Kelurahan Kedaung Baru, warga yang menerima bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 30 KK sedangkan di Kelurahan Batu Ceper yang menerima bantuan sebanyak 10 KK sehingga total penerima bantuan berjumlah 40 KK yang kesemuanya adalah masyarakat penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni. Karena objek penelitian kurang dari 100 maka menurut (Sugiyono, 2018) lebih baik dilakukan penelitian populasi yang berarti bahwa ke 40 KK tersebut semuanya akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehab RTLH ini menggunakan analisis skoring. Analisis pembobotan atau skoring ini menggunakan 5 pertanyaan dan 40 responden yang kesemuanya adalah penerima manfaat bantuan rehab rumah tidak layak huni, sehingga pengkategorian untuk tingkat partisipasinya adalah seperti tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Kategori Tingkat Partisipasi

No	Tingkat	Bobot
1	Rebellious	334 – 400
2	Collaborating	267 – 333
3	Withdrawn	200 – 266

Sumber : Analisis Peneliti (2020)

Penjelasan dari masing – masing tingkat partisipasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tipe rebellious, masyarakat berupaya untuk melakukan semua sendiri dengan kemampuan mereka sendiri ataupun mengambil tindakan yang mempengaruhi pemerintah untuk mengubah sudut pandangnya sesuai yang masyarakat inginkan. Kegiatan masyarakat dapat melampaui bentuk yang dianggap demokratis dan lebih condong ke arah kebebasan berpendapat.

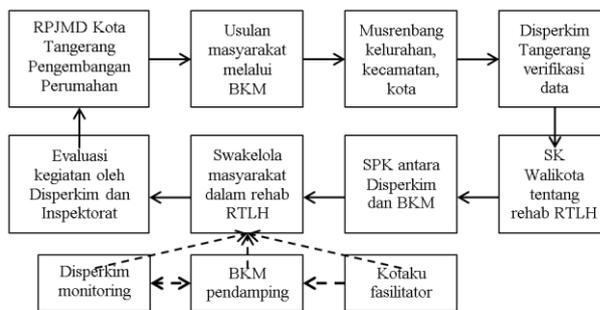
Tipe collaborating, masyarakat tertarik dan terlibat dalam setiap masalah perkotaan yang ada, mereka siap bekerjasama dan melakukannya lebih sering. Masyarakat bersikap terbuka dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah

Tipe withdrawn, masyarakat tidak tertarik terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan kota atau sekitarnya, mereka tidak mau bekerja sama karena mereka tidak tahu bahwa kerjasama dalam pembangunan itu hal yang dimungkinkan, atau karena ketidakberdayaan mereka dan mendelegasikan tanggung jawab untuk bertindak hanya kepada pemerintah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kota Tangerang pada tahun 2018 ini termasuk dalam program pengembangan perumahan dengan nama kegiatannya adalah pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Dimana pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang barang dan jasa pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni ini ada pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan pada tahap monitoring dan evaluasi ada di ranah kewenangan pemerintah seperti yang dapat dilihat dari gambar 1 berikut ini



Sumber : Analisis Peneliti (2020)

Gambar 1. Alur Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tangerang

Pada tahap perencanaan rehab RTLH masyarakat melakukan partisipasi dalam bentuk usulan atau proposal melalui BKM setempat yang isinya antara lain berupa rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, KAK, RAB serta foto kerusakan rumah yang diusulkan.

Masyarakat beserta stakeholder lain yaitu pemerintah daerah dan BKM sering melakukan dialog ataupun diskusi baik yang sifatnya formal melalui rapat dan sosialisasi ataupun yang bersifat tidak formal melalui diskusi door to door ataupun saat peninjauan lokasi kegiatan rehab RTLH seperti yang terdokumentasi di gambar 2 dibawah ini



Sumber : Hasil Survey (2020)

Gambar 2. Kegiatan Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Rehab RTLH

Pada tahap pelaksanaan rehab RTLH masyarakat melakukan partisipasi dalam bentuk penambahan biaya, material dan tenaga seperti yang terlihat di gambar 3. Disemua tahapan baik perencanaan ataupun pelaksanaan keberadaan BKM selalu memberi peran besar sebagai pendamping masyarakat, sehingga peran dari BKM memang dapat dikatakan cukup krusial dalam melaksanakan, mengawasi dan memberi arahan kepada setiap masyarakat penerima bantuan rehab RTLH ini



Sumber : Hasil Survey (2020)

Gambar 3. Kegiatan Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan Rehab RTLH

3.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan

Kami mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat tahap perencanaan pada kegiatan rehab rumah tidak layak huni di kedua lokasi menggunakan pertanyaan - pertanyaan kepada responden yang kemudian kami beri bobot untuk setiap pertanyaannya. Hasil dari pembobotannya adalah seperti dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Bobot Partisipasi Tahap Perencanaan

Indikator	Bobot	N	Bobot x N
Tertarik Membuat Rencana			
Ya	2	40	80
Tidak	1	0	0
Terlibat Dalam Perencanaan			
Ya	2	6	12
Tidak	1	34	34
Bekerjasama Dengan Stakeholder			
Ya	2	6	12
Tidak	1	34	34
Dialog Dengan Stakeholder			
Ya	2	40	80
Tidak	1	0	0
Memberi Masukan Rencana			
Ya	2	6	12
Tidak	1	34	34
Total bobot			298

Sumber : Analisis Peneliti (2020)

Dari hasil analisis pembobotan yang dilakukan pada tabel diatas maka menghasilkan total bobot sebesar 298, sehingga apabila mengacu pada tingkat partisipasi Kotus & Sowada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tangerang di tahap perencanaan berada pada posisi kedua yaitu collaborative dengan skor antara 267 – 333. Hal ini berarti dalam tahap perencanaan masyarakat

sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya, merekapun bersikap terbuka dan kooperatif kepada stakeholder lain seperti BKM dan pemerintah daerah Kota Tangerang.

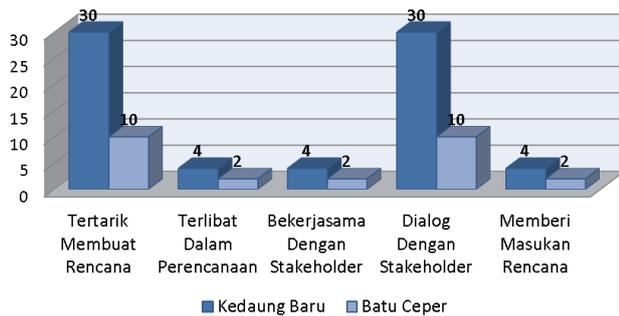
Menurut pendapat (Kotus and Sowada, 2017) pada tingkat collaborative masyarakat akan tertarik dan terlibat pada setiap masalah perkotaan, mereka siap untuk bekerjasama dan melakukannya dengan frekuensi lebih sering bersama pemilik otoritas kekuasaan. Mereka juga telah menunjuk perwakilan dari mereka untuk ikut menginisiasi pada setiap kegiatan mereka yang berhubungan dengan masalah perkotaan. Hal ini menunjukkan jika masyarakat Kota Tangerang juga telah mencapai tahapan tersebut berdasarkan dari hasil analisis diatas.

Dalam tahap perencanaan ini persentase masyarakat dilokasi penelitian yang tertarik untuk terlibat dan melakukan dialog dengan pemerintah atau BKM cukup tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat kota tangerang sangat bersikap kooperatif dan sering melakukan dialog baik dalam forum pertemuan resmi ataupun langsung secara personal kepada tim dari BKM guna mendapatkan informasi mengenai bagaimana rumah yang sehat dan layak huni.

Masyarakat dalam tahap ini juga merencanakan besaran biaya dan waktu yang akan dibutuhkan dalam merehab rumah mereka. Bersama dengan tim persiapan dari kelompok masyarakat mereka menyusun produk akhir berupa proposal yang didalamnya terdiri dari rencana kegiatan, jadwal peaksanaan, spesifikasi teknis, dan anggaran biaya. Karena latar belakang masyarakat yang bukan seorang yang paham segala bentuk hal teknis namun dengan bantuan tim persiapan dari kelompok masyarakat disana mereka menjadi lebih mengerti untuk apa – apa yang harus mereka persiapkan sebelumnya untuk menjadikan rumah mereka menjadi layak huni

Indikator untuk masing – masing kelurahan pada tahap perencanaan dapat dilihat dalam gambar 4 dibawah ini, meskipun berada pada tingkat kedua namun berdasarkan hasil dari kuesioner masih terlihat timpang antara indikator – indikator nya, masyarakat pada tahap perencanaan hanya tertarik untuk terlibat

dan berdialog saja dengan stakeholder lain (100%) namun untuk terlibat, bekerjasama dan membuat masukan perencanaan masyarakat masih sangat sedikit keterlibatannya (15%)



Sumber : Analisis Peneliti (2020)

Gambar 4. Tingkat Partisipasi Tiap Kelurahan Pada Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di kegiatan rehab RTLH ini masih menggantungkan pada peran dari BKM setempat, namun BKM memaksa masyarakat agar mengambil peran sebagai lebih besar guna mensukseskan kegiatan rehab rumah mereka di tahap perencanaan ini melalui seringnya mereka melakukan dialog atau sosialisasi bahkan sampai mendatangi rumah calon penerima manfaat.

Adanya perasaan khawatir dari masyarakat apabila tidak mengikuti arahan dari BKM akan membuat nama mereka dicoret dari daftar penerima bantuan rehab RTLH membuat masyarakat menjadi sedikit berhati hati dan cenderung menyerahkan tahapan perencanaan ini kepada BKM untuk menyelesaikannya sehingga keterlibatan masyarakat ditahap ini lebih banyak dalam hal berkomunikasi dan ketertarikan saja namun tidak berani untuk melangkah lebih jauh

3.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan

Sedangkan pada tahap pelaksanaan hasil dari pembobotannya adalah seperti dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Bobot Partisipasi Tahap Pelaksanaan

Indikator	Bobot	N	Bobot x N
Tertarik Untuk Berpartisipasi			
Ya	2	40	80
Tidak	1	0	0
Terlibat Dalam Pelaksanaan			
Ya	2	35	70
Tidak	1	5	5
Bekerjasama Dengan Stakeholder			
Ya	2	40	80
Tidak	1	0	0
Dialog Dengan Stakeholder			
Ya	2	40	80
Tidak	1	0	0
Melakukan Perubahan Pekerjaan			
Ya	2	9	18
Tidak	1	31	31
Total bobot			364

Sumber : Analisis Peneliti (2020)

Dari hasil analisis pembobotan yang dilakukan pada tabel diatas maka menghasilkan total bobot sebesar 364, sehingga apabila mengacu pada tingkat partisipasi Kotus & Sowada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tangerang di tahap pelaksanaan berada pada posisi pertama yaitu rebellious dengan skor antara 334 – 400. Hal ini berarti dalam tahap pelaksanaan masyarakat telah ada pada tingkat dimana mereka mampu bertindak atas kemauan mereka sendiri dalam melaksanakan pekerjaan rehab rumah mereka meskipun mereka juga tetap melakukan kerjasama dengan stakeholder lain dalam melaksanakan pekerjaan rehab RTLH ini seperti dengan BKM ataupun pemerintah daerah Kota Tangerang.

Menurut (Kotus and Sowada, 2017) pada tingkat collaborative masyarakat akan mengambil tindakan yang menurut mereka sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari sudut pandang mereka. Aktivitas seperti ini apabila tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup akan cenderung berbahaya oleh sebab itu diperlukan kehadiran pemerintah dalam membantu dan mengarahkan masyarakat agar tetap dalam koridor yang sesuai aturan.

Sejalan dengan hasil penelitian ini responden dalam melakukan perbaikan rumah mereka sesuai dengan tujuan dari kegiatan rehab RTLH yang didampingi oleh BKM dan

pemerintah daerah sehingga terwujudnya rumah sehat bagi masyarakat terpenuhi dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator untuk masing – masing kelurahan pada tahap pelaksanaan dapat dilihat dalam gambar 5 dibawah ini, pada tahap pelaksanaan hampir sebagian besar melakukan partisipasi dan terlibat dalam pekerjaan rehab RTLH di lingkungannya, hanya 22,5% masyarakat yang melakukan perubahan pekerjaan yang sebelumnya telah direncanakan hal ini dikarenakan pada awal perencanaan yang diprioritaskan adalah pekerjaan mengganti atap, namun karena atapnya masih bagus sehingga pekerjaan atap diganti menjadi pekerjaan perbaikan yang lain.



Sumber : Analisis Peneliti (2020)

Gambar 5. Tingkat Partisipasi Tiap Kelurahan Pada Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini masyarakat menentukan sendiri bagaimana mereka akan melakukan partisipasi. Sebagian besar dari mereka mengeluarkan uang sebagai bentuk partisipasi selain ada juga yang dalam bentuk tenaga, beberapa dari mereka bahkan sampai berhutang atau menggadaikan barang yang mereka miliki demi terwujudnya rumah layak huni untuk mereka tinggali. Masyarakat tidak merasa menyesal mengeluarkan banyak nominal untuk perbaikan rumah, mereka berpendapat bahwa pemerintah telah peduli terhadap tempat tinggal mereka sehingga mereka juga harus mengimbangi dengan membantu karena hasil dari kegiatan rehab RTLH ini masyarakat juga yang akan merasakannya

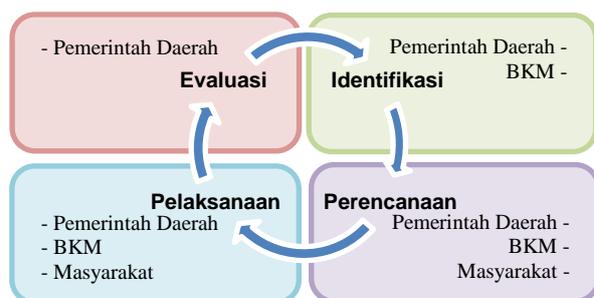
Sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai buruh sebanyak 87,5% sisanya adalah responden yang tidak bekerja. Dalam penelitian (Plummer, 2000) dikatakan

bahwa pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi, semakin sibuk orang bekerja maka akan semakin sedikit yang berpartisipasi. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, meskipun responden banyak yang bekerja namun justru partisipasinya mejadi tinggi, mereka dominan berpartisipasi dalam hal penambahan biaya baik untuk bahan baku tambahan ataupun tambahan biaya untuk tenaga kerja

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan di kegiatan rehab RTLH ini cukup tinggi, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya perasaan memiliki bahwa yang sedang diselesaikan permasalahannya adalah rumah pribadi tempat tinggal mereka sendiri sehingga masyarakat baik secara individu ataupun kelompok akan memberikan segala bentuk partisipasi apapun yang mereka sanggup lakukan demi terpenuhinya tujuan dari kegiatan rehab RTLH ini yaitu rumah sehat dan layak huni

3.3 Perbedaan Tingkat Partisipasi Pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Berdasarkan hasil analisis tahapan dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kota tangerang, secara garis besar memiliki 4 alur tahapan seperti dalam gambar 6 dibawah ini yaitu identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Masyarakat terlibat berpartisipasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, untuk kelompok masyarakat atau BKM terlibat pada tahap identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan pemerintah terlibat pada kesemua tahapan yang ada



Sumber : Analisis Peneliti (2020)

Gambar 6. Tahapan Dan Aktor Yang Terlibat Dalam Kegiatan Rehab RTLH

Menurut (Kotus and Sowada, 2017) partisipasi yang baik adalah adanya kerjasama dan pembagian peran yang tepat untuk masing – masing aktor yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas (*participatory urban triad*) dalam melakukan aktivitas pembangunan kota, namun dalam penelitian kali ini terdapat perbedaan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan yaitu di tingkat collaborative dan pelaksanaan yaitu di tingkat rebellious, hal ini terjadi karena peran stakeholder lain lebih besar daripada masyarakatnya sendiri

Menurut (Sunarti, 2003) faktor eksternal mempengaruhi keberhasilan kegiatan partisipasi masyarakat, pada kegiatan rehab RTLH ini peran dari BKM cukup signifikan karena BKM cukup intens keterlibatannya baik dari tahap identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan dengan membentuk 3 kelompok tim yaitu tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas

Kegiatan rehab RTLH di Kota Tangerang pada tahap perencanaan peran masyarakat belum dominan meskipun sudah terlibat apabila dibandingkan pada saat tahap pelaksanaan, kerjasama masyarakat dengan stakeholder lain pada tahap perencanaan masih rendah mereka masih lebih menggantungkan penyelesaian perencanaan pada pemerintah dan BKM setempat, hal inilah yang membuat perbedaan hasil tingkat partisipasi di tahap perencanaan dan pelaksanaan menjadi berbeda

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Salah satu cara dalam mengatasi kawasan kumuh dapat dilakukan melalui kegiatan rehab rumah tidak layak huni dengan melibatkan masyarakat itu sendiri untuk melakukan partisipasi baik pada tahap perencanaan ataupun pelaksanaan di kegiatan tersebut

Secara garis besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kota Tangerang menurut teori partisipasi Kotus & Sowada berada di tingkat tertinggi atau rebellious dimana masyarakat sudah mau berkoordinasi dan kooperatif bekerja sama dengan stakeholder lain dalam hal ini pemerintah daerah dan BKM serta masyarakat juga sudah mampu untuk memutuskan sendiri kebutuhan pekerjaan yang akan diambil

meskipun hal itu terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan rehab rumahnya.

4.2. Saran

Kepada setiap stakeholder yang terlibat dalam kegiatan rehab RTLH ini, pada tahap perencanaan masyarakat sebaiknya diberikan peran lebih aktif lagi untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya karena selama ini masih bergantung pada keputusan dari BKM setempat.

Untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah kami memandang perlunya penelitian terhadap faktor eksternal yang juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kota Tangerang sehingga diperoleh gambaran lebih jauh bagaimana peran stakeholder seperti BKM dan pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi disetiap kegiatan pembangunan daerahnya.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada masyarakat Kelurahan Kedaung Baru, Kelurahan Batu Ceper, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang, BKM Kota Tangerang, serta Bappenas dengan nomor SK 417/P.01/04/2018 atas pemberian bantuan penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alliance, C. (2014) *for City Without Slums*. Available at: https://www.citiesalliance.org/slum-upgrading#What_is_slum_upgrading_.
- Burton, P. (2004) 'Power to the People? How to Judge Public Participation', *Local Economy*, 19(3), pp. 193–198. doi: 10.1080/0269094042000253608.
- Creswell, J. W. (2009) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd edn. London, England: Sage Publications Ltd.
- Dittmann, J. and Goebel, J. (2010) 'Your House, Your Car, Your Education: The Socioeconomic Situation of the Neighborhood and its Impact on Life Satisfaction in Germany', *Social Indicators Research*, 96(3), pp. 497–513. doi:

10.1007/s11205-009-9489-7.

- Flint, R. W. (2013) *Practice of Sustainable Community Development*. New York: Heidelberg Dordrecht. doi: 10.1007/978-1-4614-5100-6.
- Groenendijk, L. (2003) *Planning and Management Tools*. Enschede, The Netherlands: The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation.
- Kotus, J. and Sowada, T. (2017) 'Behavioural model of collaborative urban management: extending the concept of Arnstein' s ladder', *Cities*. Elsevier Ltd, 65, pp. 78–86. doi: 10.1016/j.cities.2017.02.009.
- Melkote, S. R. and Steeves, H. L. (2001) *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment*. California: Sage Publications Ltd.
- Muchadenyika, D. and Waiswa, J. (2018) 'Policy , politics and leadership in slum upgrading: A comparative analysis of Harare and Kampala', *Cities*. Elsevier, (December 2017), pp. 0–1. doi: 10.1016/j.cities.2018.05.005.
- Plummer, J. (2000) *Municipalities and Community Participation : a Sourcebook for Capacity Development*. United Kingdom: Earthscan Publications Ltd.
- Roseland, M. and Spiliotopoulou, M. (2017) *Sustainable Community Planning and Development*, *Encyclopedia of Sustainable Technologies*. Elsevier. doi: 10.1016/B978-0-12-409548-9.10185-X.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif*. 1st edn. Edited by Setiyawami. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, S. (2003) 'Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok', *Jurnal Tata Loka*, 5(1).